



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEPOLISIAN DAERAH PAPUA BARAT DAYA

DENGAN

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG

Nomor: NK / 3 /III/2025
Nomor: 03/In.41/3/2025

TENTANG

PELAKSANAAN (CAT) *COMPUTER ASSISTED TEST*
DALAM RANGKA PENERIMAAN TERPADU ANGGOTA POLRI DAN PENDIDIKAN
PENGEMBANGAN UMUM ANGGOTA POLRI
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN DAERAH PAPUA BARAT DAYA

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Belas Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Aula Bhayangkara Aspol Remu Kota Sorong, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. KOMBES POL I DEWA GDE JULIANA, S.H., S.I.K., M.H.

Bertindak dan untuk atas nama Ketua Subpanda Papua Barat Daya Polda Papua Barat dan sebagai Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kepolisian Daerah Papua Barat Daya, berkedudukan di Jalan [REDACTED]
[REDACTED] selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Dr. SUPARTO IRIBARAM, S.Sos., M.A.

Rektor Institut Agama Islam Negara (IAIN) Sorong, dalam Nota Kesepahaman ini bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Institut Agama Islam Negara (IAIN) Sorong, berkedudukan di [REDACTED]
[REDACTED] selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA, merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;
2. Bahwa PIHAK KEDUA, merupakan sebuah lembaga yang bertugas melaksanakan proses pengajaran mahasiswa/i di bawah pengawasan dosen.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah;
7. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/2100/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Polri T.A. 2025.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat mengadakan Nota Kesepahaman pada pemeriksaan administrasi serta kerja sama pinjam pakai sarana dan prasarana *Computer Assisted Test* (CAT) pada penerimaan terpadu anggota Polri (SIPSS, Akpol, Bintara, Tamtama, CPNS dan PPPK) serta Pendidikan Pengembangan Umum (DIKBANGUM) Polri (SIP, PAG dan SBP) di Kepolisian Daerah Papua Barat Daya, melalui kesepahaman bersama dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

BAB I**MAKSUD DAN TUJUAN****Pasal 1**

- 1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai ikatan untuk meningkatkan kerja sama antara PARA PIHAK pada pemeriksaan administrasi serta pelaksanaan tes yang menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) pada penerimaan terpadu anggota Polri (SIPSS, Akpol, Bintara, Tamtama, CPNS dan PPPK) serta Pendidikan Pengembangan Umum (DIKBANGUM) Polri (SIP, PAG dan SBP) guna mewujudkan prinsip seleksi yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (BETAH) di lingkungan Polda Papua Barat Daya;
- 2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK dalam penyelenggaraan Penerimaan terpadu anggota Polri (SIPSS, Akpol, Bintara, Tamtama, CPNS dan PPPK) serta Pendidikan Pengembangan Umum (DIKBANGUM) Polri (SIP, PAG dan SBP) untuk mendapatkan Sumber Daya Manusia Polri yang Profesional, Modern dan Terpercaya dalam melaksanakan tugas sebagai Pelindung, Pengayom, Pelayan Masyarakat dan Penegak Hukum.

BAB II**RUANG LINGKUP****Pasal 2**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi pelaksanaan penerimaan anggota Polri tanpa mengurangi tugas pokoknya, PARA PIHAK akan saling membantu dalam pemeriksaan administrasi serta pelaksanaan tes yang menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan fasilitas yang ada di lingkungan PARA PIHAK.

BAB III**PELAKSANAAN****Bagian Kesatu
Prinsip Pelaksanaan****Pasal 3**

- 1) Bersih yaitu dilaksanakan secara ketat sehingga tidak ada celah untuk KKN bagi siapapun;
- 2) Transparan yaitu dilaksanakan secara jelas dan terbuka pada setiap tahapan penerimaan;
- 3) Akuntabel yaitu pengawasan yang dilaksanakan harus dapat dipertanggung jawabkan secara vertikal maupun horizontal;
- 4) Humanis yaitu pelaksanaan penerimaan dilaksanakan dengan manusiawi;
- 5) Obyektif yaitu pengawasan yang dilakukan harus sesuai dengan keadaan di lapangan dengan laporan yang disampaikan;
- 6) Netral yaitu pengawasan yang dilakukan tidak memihak atau tidak mewakili kepentingan tertentu dalam proses penerimaan;
- 7) Integratif yaitu pengawasan harus dilakukan secara terorganisir dengan berkoordinasi kepada semua PIHAK yang terlibat;
- 8) Tegas yaitu pengawasan harus dilakukan dengan penuh ketegasan namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia.

Bagian Kedua**Pelaksanaan Kegiatan****Pasal 4**

- 1) PARA PIHAK akan saling membantu dalam pemeriksaan administrasi serta pelaksanaan tes yang menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan fasilitas yang ada di lingkungan PARA PIHAK;
- 2) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penerimaan terpadu anggota Polri hanya dibatasi dalam bidang pemeriksaan administrasi serta pelaksanaan tes yang menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT);

- 3) Pelaksanaan pemeriksaan administrasi serta pelaksanaan tes yang menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) dibatasi pada wilayah hukum Kepolisian Daerah Papua Barat Daya;
- 4) Dalam melaksanakan berbagai tahapan penerimaan anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, PIHAK KEDUA bersedia memberikan bantuan sebagai berikut:
 - a. Meminjamkaikan Sarana dan Prasarana pada pelaksanaan tes yang menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) berupa laboratorium komputer beserta perangkat pendukung;
 - b. Memberikan tenaga bantuan personel sekolah (proktor, teknisi dan lain-lain) yang memiliki kompetensi sesuai dengan tugasnya, namun tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan kelulusan.
- 5) Apabila selama pelaksanaan PIHAK KEDUA menemukan penyimpangan di dalam proses seleksi penerimaan, agar pada kesempatan pertama terlebih dahulu melaporkan dan berkoordinasi dengan PIHAK PERTAMA, dalam hal ini adalah pengawas internal Polda Papua Barat Daya;
- 6) PIHAK KEDUA tidak mencampuri dan tidak melakukan intervensi wewenang, tugas dan tanggung jawab Subpanda/Panitia Daerah, dalam hal ini adalah PIHAK PERTAMA;
- 7) PARA PIHAK saling menjaga kerahasiaan informasi yang bersifat teknis sebelum dimusyawarahkan oleh PARA PIHAK untuk diumumkan.

Bagian Ketiga

Tempat dan waktu Kegiatan

Pasal 5

- 1) Tempat pelaksanaan kegiatan penerimaan terpadu anggota Polri (SIPSS, Akpol, Bintara, Tamtama, CPNS dan PPPK) serta Pendidikan Pengembangan Umum (DIKBANGUM) Polri (SIP, PAG dan SBP) di lingkungan Polda Papua Barat Daya ditentukan oleh PIHAK PERTAMA;

- 2) Waktu Pelaksanaan kegiatan penerimaan terpadu anggota Polri (SIPSS, Akpol, Bintara, Tamtama, CPNS dan PPPK) serta Pendidikan Pengembangan Umum (DIKBANGUM) Polri (SIP, PAG dan SBP) mengacu pada jadwal yang telah ditetapkan oleh panitia pusat (Panpus).

BAB IV

SOSIALISASI

Pasal 6

Nota Kesepahaman ini dalam pelaksanaannya disosialisasikan kepada jajaran PARA PIHAK guna diketahui dan dilaksanakan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibiayai oleh PIHAK PERTAMA yang bersumber dari Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Kepolisian Daerah Papua Barat / Kepolisian Daerah Papua Barat Daya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun proses pembiayaan pinjam pakai Sarana dan Prasarana pada pelaksanaan tes yang menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT), sebagai berikut:

- a. Biaya pinjam pakai laboratorium komputer, sarana dan prasarana *Computer Assisted Test* (CAT) beserta perangkat pendukung sebesar RP. 25.000,- /komputer/hari;
- b. Biaya honor Personel Sekolah (Proktor, Teknisi dan Penanggung jawab) menyesuaikan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (nomor 9, poin 9.4).

2024 146.6 / 146.6

BAB VI**KETENTUAN LAIN****Bagian Kesatu
Perubahan (addendum)****Pasal 8**

Setiap perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, selanjutnya akan diatur di kemudian hari atas dasar pemufakatan bersama PARA PIHAK serta dituangkan dalam bentuk *addendum* Nota Kesepahaman yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Bagian Kedua**Penyelesaian Perselisihan****Pasal 9**

- 1) PARA PIHAK akan saling menghormati dan membantu dalam melaksanakan tugasnya dengan menaati peraturan yang telah disepakati bersama serta saling menciptakan situasi yang aman dan kondusif;
- 2) Apabila di kemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga**Masa Berlaku****Pasal 10**

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu **1 (satu) tahun**, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan Kesepahaman bersama PARA PIHAK;
- 2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK dengan melakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Nota Kesepahaman ini;

- 3) Nota kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini;
- 4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan Perundang-undangan dan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tanpa terikat dengan ketentuan waktu yang dimaksud pada ayat (1).

BAB VII

PENUTUP

Pasal 11

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari ini, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermaterai cukup serat mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh PARA PIHAK.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk selanjutnya dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
KARO SDM POLDA PAPUA BARAT DAYA



I DEWA GDE JULIANA, S.H., S.I.K., M.I.K.
KOMBES [REDACTED]

PIHAK KEDUA
REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG



Dr. SUPARTO IRIBARAM, S.Sos., M.A.